

SOSIALISASI PROGRAM KERJA DMO SEMBALUN DAN STRATEGI KOLABORATIF DALAM Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Sembalun

Lalu Putrawandi Karjaya^{*}, Kinanti Rizsa Sabilla, Mega Nisfa Makhroja

*Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: putrawandi@unram.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada penguatan tata kelola pariwisata berkelanjutan di Kawasan Sembalun, Lombok Timur, melalui pendekatan partisipatif yang berbasis Focus Group Discussion (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pariwisata di Sembalun menghadapi isu multidimensional, meliputi degradasi lingkungan akibat lemahnya implementasi tata ruang, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang lebih banyak dinikmati investor eksternal, erosi nilai budaya lokal, serta kerentanan perempuan dalam menghadapi dampak pariwisata. Di sisi lain, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dan lemahnya regulasi memperburuk kompleksitas tata kelola destinasi. Dalam konteks ini, Destination Management Organization (DMO) Sembalun berperan sebagai fasilitator kolaborasi lintas aktor, meskipun masih menghadapi hambatan struktural dan sumber daya. Akademisi turut hadir sebagai mediator konseptual yang menjembatani kesenjangan antara jargon global, seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan collaborative governance dengan pemahaman masyarakat lokal. Inovasi yang diimplementasikan dalam kegiatan ini meliputi penerjemahan konsep global ke bahasa dan simbol lokal, revitalisasi budaya sebagai modal sosial, skema kolaborasi partisipatif, strategi inklusi gender dan pemuda, serta advokasi kebijakan berbasis bukti. Temuan tersebut menegaskan bahwa inovasi dalam tata kelola pariwisata Sembalun bukan hanya bersifat teknokratis, melainkan transformasi sosial yang berakar pada kearifan lokal dan memperkuat keadilan struktural.

Kata kunci: Destination Management Organization, Sustainable Development Goals, Collaborative Governance, Pariwisata Berkelanjutan, Sembalun

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sembalun merupakan kawasan yang terletak di kaki Gunung Rinjani yang telah lama menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di mana keindahan alam yang dimiliki dengan berbagai macam keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya lokal telah menjadikan Sembalun sebagai salah satu destinasi wisata alam yang telah banyak diketahui wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Saat ini, Sembalun bahkan telah masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), di mana dengan sumber dayanya, Sembalun menawarkan berbagai atraksi ekowisata yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Meski demikian, seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di kawasan ini, telah muncul berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi di Sembalun. Permasalahan ini dapat berupa kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan perolehan manfaat ekonomi dari aktifitas pariwisata, serta kurangnya koordinasi yang terjadi antara para pemangku kepentingan yang kemudian menjadi isu mendesak untuk dilihat.

Adapun peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam diakibatkan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan yang dinilai cukup signifikan. Beberapa contoh nyata termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air dan

peningkatan limbah dan jumlah sampah, di mana dampak ini tidak hanya mengancam kelangsungan ekologi, tetapi turut mengurangi daya tarik wisatawan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan adanya pariwisata massal ke destinasi di Sembalun seringkali tanpa melihat kapasitas destinasi dan mengabaikan daya dukung lingkungan, sehingga memperparah permasalahan lingkungan yang ada. Di Sembalun, masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penerima manfaat sekunder dari aktivitas pariwisata, sementara sebagian besar keuntungan ekonomi justru mengalir ke pihak luar Sembalun.

Lebih lanjut, sebagai kawasan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan tercapainya SDGs, Sembalun memerlukan strategi pengelolaan yang terpadu dan inklusif. Di mana Destination Management Organization (DMO) Sembalun, sebagai sebuah organisasi pengelola destinasi yang berbasis komunitas memiliki peranan strategis dalam mengintegrasikan program kerja yang mendukung Pembangunan yang berkelanjutan. DMO Sembalun berupaya mengembangkan program kerja yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan dan menjaga keberlanjutan budaya. Selain itu, dalam konteks SDGs, DMO memiliki tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan pariwisata di Sembalun selaras dengan beberapa poin SDGs, diantaranya adalah SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 12 (Responsible Consumption and Production) (Mulyani et al., 2021) dan SDG 15 (Life on Land). Meski demikian, upaya yang dilakukan oleh DMO Sembalun tidaklah terlepas dari berbagai tantangan, di mana tekanan terhadap sumber daya alam akibat meningkatnya jumlah wisatawan, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya praktik keberlanjutan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial menjadi hambatan dalam implementasi program kerja DMO (Mulyani et al., 2021). Selain itu, adanya kesenjangan koordinasi antara DMO, pemerintah desa, dan komunitas lokal yang menyebabkan program-program yang telah direncanakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Faktor kelembagaan ini memerlukan perbaikan, termasuk penguatan regulasi, evaluasi program yang lebih sistematis, dan pengelolaan data berbasis bukti untuk mendukung kebijakan (Ulfa, 2023).

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupaya untuk memperkenalkan program kerja DMO Sembalun dan strategi implementasinya, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian SDGs di kawasan ini. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, baik pengelola DMO Sembalun, pemerintah desa di Kecamatan Sembalun, komunitas lokal, dan pelaku usaha pariwisata. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog interaktif yang memungkinkan pertukaran gagasan, pengalaman, dan solusi antara DMO, masyarakat, dan pemerintah. Pendekatan kolaboratif yang menjadi fokus dalam kegiatan ini didasarkan pada penerapan teori Collaborative Governance yang menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dimana dalam konteks pengelolaan pariwisata di Sembalun, Collaborative Governance memungkinkan terciptanya tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel (Voets et al., 2021). Melalui dialog dan kerja sama yang erat, berbagai perspektif dan kepentingan dapat diakomodasi sehingga solusi yang dihasilkan bersifat lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pariwisata di Sembalun. Melalui pelibatan pemerintah desa, komunitas lokal, dan DMO Sembalun dalam sebuah ruang dialog yang konstruktif, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pencapaian SDGs. Kawasan Sembalun memiliki potensi besar untuk menjadi model destinasi wisata berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal.

Adapun permasalahan yang dihadapi dinilai cukup kompleks dan multidimensional. Di mana degradasi lingkungan muncul sebagai salah satu isu utama yang termasuk ke dalam kerusakan ekosistem, peningkatan jumlah limbah sampah, kurangnya akses air bagi masyarakat di Sembalun hingga eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali akibat pariwisata massal. Masalah ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang membuat masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penerima manfaat sekunder, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha dari luar kawasan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara DMO, pemerintah desa maupun provinsi dapat menghambat pelaksanaan program kerja yang direncanakan. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan dana juga menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi untuk mendukung pengelolaan destinasi dan pencapaian SDGs di Kawasan Sembalun. Di mana kesadaran masyarakat yang masih

rendah terkait pentingnya praktik keberlanjutan juga perlu menjadi perhatian khusus dalam program sosialisasi ini.

Lebih lanjut, tantangan lainnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung implementasi program kerja DMO. Di mana kebijakan yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, termasuk regulasi terkait pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan pengawasan aktivitas pariwisata. Tanpa kerangka hukum yang kuat, pelaksanaan program kerja akan sulit berjalan optimal. Selain itu, adanya kesenjangan teknologi dan akses informasi di antara pemangku kepentingan juga menjadi kendala. DMO, pemerintah desa, dan komunitas lokal memerlukan platform komunikasi yang efektif agar seluruh pihak yang terlibat dapat saling berbagi data, informasi, dan rencana aksi secara transparan dan real-time. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan destinasi akan mempermudah pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, maka dirumuskan kerangka pemecahan masalah yang komprehensif, yang mencakup beberapa langkah strategis yang disusun secara sistematis guna memastikan keberhasilan kegiatan ini. Adapun kerangka pemecahan melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

a. Pemahaman Program Kerja DMO Sembalun

Pemahaman yang mendalam mengenai program kerja DMO Sembalun menjadi tahapan pertama dalam melihat jalan keluar permasalahan yang ada. Di mana hal ini mencakup sosialisasi visi misi DMO Sembalun beserta program kerjanya dalam mengembangkan Sembalun sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan adanya pemahaman bersama terkait program kerja tersebut agar dapat terjalin kerjasama antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, komunitas lokal, pelaku usaha, dan akademisi.

b. Peranan Berbagai Pihak Sesuai dengan *Collaborative Governance*

Implementasi program kerja DMO Sembalun membutuhkan peranan aktif dari seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip *Collaborative Governance*. Pemerintah daerah bertindak sebagai regulator yang mengeluarkan kebijakan pendukung dan menyediakan sumber daya. Komunitas lokal berperan sebagai pelaksana langsung yang menjaga kelestarian lingkungan dan melestarikan budaya setempat. Pelaku usaha mendukung melalui investasi dan pengembangan ekonomi kreatif, sementara akademisi dan lembaga penelitian menyediakan data ilmiah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

c. Sinergi antara Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Mendukung SDGs di Kawasan Sembalun

Sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian SDGs di Sembalun. Di mana melalui kerjasama yang terstruktur, transparan dan akuntabel, target SDG 6, SDG 8, SDG 12 dan SDG 15 dapat dicapai.

METODE KEGIATAN

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun dan Strategi Kolaboratif dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Sembalun adalah *Focus Group Discussion* (FGD).

Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran pada program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengelola DMO Sembalun dan pemangku kepentingan seperti Camat Sembalun, Kepala Desa/ Pemerintah Desa di Sembalun, serta komunitas lokal. Pada implementasinya, program pengabdian ini berupa sosialisasi untuk melihat program kerja DMO Sembalun dan membangun diskusi antara pemangku kepentingan dalam perannya dan kontribusi dalam kerangka *collaborative governance* dalam mengelola Sembalun agar menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan serta mendukung tercapainya SDGs.

Peserta Kegiatan

Rancangan target peserta dalam kegiatan ini adalah pengelola DMO Sembalun dan pemangku kepentingan seperti Camat Sembalun, Kepala Desa/ Pemerintah Desa di Sembalun, serta komunitas lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN**Isu Sentral Pariwisata di Kawasan Sembalun**

Hasil FGD menggambarkan bahwa tekanan terhadap lingkungan di kawasan Sembalun telah mencapai titik kritis. Peserta menyebutkan bahwa sumber daya air yang dulunya melimpah kini sering mengering, terutama saat musim puncak kunjungan wisatawan. Hal ini diperparah oleh bertambahnya volume sampah domestik dan non-domestik yang tidak diimbangi sistem pengelolaan sampah terpadu. Seorang warga desa menyatakan bahwa ketersediaan air mulai susah, sampah menumpuk di sungai kecil yang menghambat jalur air dan mencemari lingkungan, bahkan suara music dan kendaraan yang keras seperti mengusik ketenangan desa. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Fenomena ini mencerminkan tekanan ekologis yang mendesak intervensi tata kelola lingkungan yang terpadu. Pembangunan fasilitas wisata seperti vila dan hotel, yang dibangun tanpa menjalani prosedur AMDAL memperparah degradasi ekologis. Hal ini turut disampaikan oleh peserta FGD, yang menekankan bahwa telah banyak pembangunan vila yang sekadar berdiri, tidak resmi, tapi nyata mengambil air tanah dan membangun lahan tanpa izin. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Kondisi tersebut memperlihatkan fragilitas sistem tata ruang lokal dan ketimpangan antara pertumbuhan fisik dan regulasi lingkungan. Hal ini kemudian selaras dengan temuan Hawkins et al., yang mengemukakan bahwa kawasan geopark Rinjani-Lombok rentan terhadap degradasi lingkungan karena lemahnya penegakan regulasi dan tingginya tekanan wisatawan. (Hawkins et al., 2021) Lebih lanjut, gangguan suara dan polusi visual pada akhirnya dinilai telah mengganggu ekosistem lokal, khususnya habitat fauna endemik dan ketenangan komunitas. Gangguan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, namun juga mengikis harmoni ekologis yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat. Di mana dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan sektor pariwisata hendaknya selaras dengan pemeliharaan ekosistem alami. Dengan demikian, degradasi lingkungan dan ketidaksesuaian tata ruang merupakan isu sentral yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga merusak pondasi sosial dan budaya masyarakat Sembalun. Intervensi yang efektif harus melibatkan penguatan implementasi AMDAL, pemulihan infrastruktur pengelolaan limbah, serta penataan zonasi wisata ramah lingkungan yang mengadopsi pendekatan adaptive governance dalam sistem tata kelola desa.

Lebih lanjut, FGD yang telah dilakukan turut mengungkapkan ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat lokal. Di mana sebagian besar keuntungan pariwisata telah masuk kantong luar, sementara desa tetap menanggung beban operasional dan sosial. Kepala Desa Sembalun menyatakan bahwa desa hanya dapat dampak samping, seperti jalan rusak atau sampah, tetapi tidak mendapat insentif atau kontribusi dari hotel maupun vila yang berdiri. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Ketimpangan ini menciptakan ketidakpuasan yang berpotensi merusak kohesi sosial, karena warga merasa menjadi korban tunggal dari pertumbuhan ekonomi yang majunya hanya di permukaan. Temuan ini sejalan dengan analisis Vitriani et al., yang menyatakan bahwa kepemilikan pariwisata di wilayah pedesaan kerap kali didominasi oleh pelaku eksternal, menghasilkan nilai ekonomi yang terkonsentrasi dan minim kontribusi bagi komunitas lokal. (Vitriani et al., 2017) Penelitian mereka menemukan bahwa ekonomi desa tidak tumbuh secara optimal karena adanya kehadiran investor luar yang kurang melibatkan masyarakat dalam aliran nilai (value chain), mulai dari penyediaan homestay, pengembangan wisata pedesaan hingga pemasaran. (Vitriani et al., 2017) Ketimpangan manfaat ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material, tetapi juga erosi kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pariwisata sebagai alat pembangunan. Menurut teori pembangunan inklusif, keberlanjutan komunitas sangat bergantung

pada sense of fairness dalam distribusi manfaat ekonomi. Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan, mereka cenderung menarik dukungan atau bahkan resistensi terhadap kebijakan pengelolaan destinasi. Adapun solusi yang diperlukan mencakup penyusunan skema partisipasi ekonomi, yang dapat dilihat dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan usaha kecil (UMKM), serta keterlibatan dalam tata kelola wisata. Hal ini dapat diimplementasikan melalui model Community-Based Tourism (CBT) di mana masyarakat memiliki agensi dalam setiap tahap, meningkatkan equity dan pemerataan manfaat.

Selain itu, FGD memunculkan kekhawatiran mendalam atas terkikisnya nilai-nilai budaya lokal yang selama ini menjadi karakteristik Sembalun. Masyarakat menyatakan bahwa tradisi selakaran, bale beleq, gotong royong, serta semangat komunitas semakin tergerus oleh homogenisasi budaya akibat pariwisata. Nilai budaya harus dipandang sebagai aset modal sosial yang kuat dalam strategi pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Ketika kearifan lokal dikurangi atau diabaikan, destinasi kehilangan panjang ragangnya. Hal ini bukan hanya soal estetika, namun soal keberlanjutan sosial dan identitas, namun sebagai pilar utama dalam model pembangunan budaya di dunia pariwisata. Lebih jauh, erosi budaya memberi dampak dua arah, yaitu hilangnya daya tarik destinasi sekaligus melemahkan kohesi komunitas. Ketika tradisi diabaikan, masyarakat kehilangan peran kolektif yang mendukung resilience sosial dalam menghadapi perubahan. Hal ini menjadikan peran pelestarian budaya sebagai intervensi strategis yang menyatukan tujuan preservasi identitas dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun solusi yang dapat ditawarkan mencakup program pelestarian budaya, misalnya festival lokal, pewarisan seni tradisional, serta dokumentasi digital yang melibatkan generasi muda dan tokoh adat. Strategi ini harus menjadi bagian sistematis dalam rencana pengembangan pariwisata.



FGD mengungkapkan bahwa perspektif gender menjadi isu yang sering terabaikan. Direktur Utama DMO Sembalun menyampaikan bahwa sekitar 99% perempuan merasa bahwa pariwisata membawa risiko, seperti anak kurang aman, air kurang tersedia, rumah berkembang jadi semrawut, yang pada akhirnya ini menjadi beban bagi mereka. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Ungkapan ini membuka mata akan bagaimana pariwisata membawa distribusi dampak yang tidak merata, terutama menimpa Perempuan, khususnya yang berada di Kawasan Sembalun. Di mana dalam kerangka pembangunan yang adil, perspektif gender penting untuk diintegrasikan dalam perumusan kebijakan. Partisipasi perempuan bukan hanya soal representasi, tapi juga peran strategis dalam tata kelola sosial. Ketika perempuan dikucilkan, aspek kesejahteraan keluarga dan komunitas cenderung terabaikan, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pembangunan. Selain itu, kerentanan ini tidak hanya bersifat fisik yang mampu untuk langsung diamati, tetapi juga bersifat sosial, di mana perempuan sering menghadapi tekanan ganda antara mengelola rumah tangga dan menjaga kerapihan lingkungan. Sedangkan dalam kerangka keadilan sosial, pembangunan pariwisata seharusnya tidak menciptakan beban tambahan, tetapi secara aktif mengurangi ketimpangan melalui pelibatan perempuan dalam organisasi komunitas pariwisata dan pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan. Oleh karena itu, intervensi kolaboratif dalam pengelolaan destinasi tidak lengkap tanpa strategi inklusif gender. Hal ini dapat diwujudkan

melalui kebijakan seperti pelibatan dalam perencanaan desa hingga penilaian risiko berbasis gender (Gender Responsive Budgeting). Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan resiliensi komunitas dan keadilan struktural dalam konteks pariwisata di kawasan.

Selain itu, ketidakselarasan perilaku stakeholder dengan ketentuan formal menjadi salah satu sorotan utama. Desa mengakui adanya RT/RW dan peraturan AMDAL, namun implementasinya lemah karena tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengawasi investor. “Kita tidak punya wewenang menolak pembangunan, kabupaten yang punya, tapi komunikasi gap besar”. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan deficit legitimasi vertikal dalam tata kelola lokal. Di mana efektivitas tata kelola terletak pada kapasitas kolaboratif antar aktor, pengetahuan lokal, dan fleksibilitas institusional. Dalam konteks Sembalun, regulasi formal hendaknya dilengkapi dengan jaringan pengaturan lokal berbasis pelibatan komunitas dan akuntabilitas bersama, tidak hanya terfokus pada sistem birokrasi terpusat. Ketiadaan mekanisme pengawasan desa terhadap pelanggaran tata ruang menciptakan ruang hukum di mana investor dapat mengoperasikan tanpa tanggung jawab. Ini menyebabkan ketegangan antara pembangunan fisik dan legitimasi sosial. Rekomendasi strategis meliputi advokasi penguatan kelembagaan desa (melalui regulasi kabupaten/provinsi) agar memiliki otoritas peninjauan AMDAL lokal, pendampingan hukum, serta sistem monitoring partisipatif bersama DMO dan akademisi. Hal ini dapat memperkuat legitimasi tata kelola dan memberdayakan desa sebagai aktor utama dalam pengawasan pembangunan destinasi.

Pola Kolaborasi DMO Sembalun dan Peran Aktor

Keberadaan Destination Management Organization (DMO) di Sembalun merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan pengelolaan destinasi wisata yang semakin kompleks. Sebagai sebuah forum multi-stakeholder, DMO diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah desa, akademisi, dan pelaku usaha. Hasil FGD mengungkap bahwa DMO telah memainkan peran penting dalam menjembatani berbagai kepentingan, meskipun efektivitas kolaborasi masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait kesenjangan kewenangan, asimetri informasi, dan lemahnya implementasi regulasi. Berdasarkan Collaborative governance diperlukan adanya keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan, didukung oleh kepercayaan, dialog tatap muka, serta komitmen jangka panjang. (Ansell & Gash, 2007) Dalam konteks Sembalun, pola kolaborasi antara DMO dan aktor lainnya mencerminkan upaya menuju tata kelola kolaboratif, namun masih perlu diperkuat melalui mekanisme formal, strategi komunikasi yang adaptif, dan distribusi kewenangan yang lebih setara.

FGD memperlihatkan bahwa DMO menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan tunggal. Direktur Utama DMO Sembalun menekankan bahwa organisasi ini bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti jargon global seperti SDGs. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Posisi ini menjadikan DMO sebagai jembatan antara wacana pembangunan global dengan kepentingan lokal. Dalam diskusi, DMO mengajukan konsep bahwa pariwisata sebaiknya diposisikan sebagai “hasil” dari pembangunan berbasis sektor lain, seperti pertanian sehat, masyarakat cerdas, dan lingkungan Lestari, bukan sebagai fondasi utama pembangunan desa. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma, dari pariwisata sebagai tujuan utama menuju pariwisata sebagai konsekuensi positif dari pembangunan holistik. Namun, peran fasilitatif DMO masih terbatas oleh kapasitas sumber daya dan keterbatasan otoritas formal. Tanpa dukungan regulasi dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah, posisi DMO kerap terjebak pada fungsi diskursif, belum optimal dalam pengambilan keputusan substantif.

Lebih lanjut, pemerintah desa berperan sebagai aktor yang berada di garis depan dalam mengelola interaksi antara masyarakat dan investor. Kepala Desa Sembalun dalam FGD menyampaikan bahwa desa sering menjadi pihak yang harus menyelesaikan konflik sosial, misalnya terkait pembangunan vila yang mengganggu aktivitas pertanian warga. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan kewenangan, di mana desa memikul beban tanggung jawab sosial tanpa memiliki otoritas

legal yang cukup dalam pengawasan tata ruang. Padahal, keberhasilan tata kelola sumber daya bersama memerlukan distribusi kewenangan yang sesuai dengan kapasitas lokal. Tanpa penguatan otoritas desa, kolaborasi akan timpang karena desa hanya menjadi mediator pasif. Meski demikian, pemerintah desa tetap memainkan peran penting sebagai kanal formal dalam penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). FGD menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang forum ini sebagai simbol partisipasi, yang diharapkan dapat memengaruhi keputusan strategis.



Pada masyarakat lokal merupakan aktor kunci sekaligus pihak yang paling terdampak oleh pariwisata. FGD memperlihatkan adanya kesadaran kritis dari masyarakat, seperti terkait polusi suara, hilangnya identitas desa, dan semakin rapuhnya solidaritas sosial. Salah seorang peserta menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pariwisata, tapi jangan sampai hanya jadi tamu di rumah sendiri. (Transkrip Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun Dan Strategi Kolaboratif Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kawasan Sembalun, 2025) Kesadaran ini menunjukkan potensi kuat masyarakat sebagai pengawas sosial dalam tata kelola destinasi. Partisipasi komunitas dalam pariwisata berbasis masyarakat bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga membangun legitimasi sosial. Namun, partisipasi masyarakat di Sembalun masih lebih bersifat konsultatif daripada deliberatif. Masyarakat diundang dalam forum, tetapi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Potensi masyarakat perlu diperkuat melalui program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas manajerial kelompok sadar wisata (pokdarwis), serta akses terhadap skema pembiayaan usaha mikro. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam rantai nilai pariwisata.

Lebih lanjut, hasil analisis FGD menunjukkan sejumlah tantangan utama dalam pola kolaborasi di Sembalun, yaitu:

1. Asimetri kewenangan: desa memiliki tanggung jawab sosial tetapi minim otoritas legal.
2. Kesenjangan pengetahuan: masyarakat sering tidak memahami konsep global, sementara investor dan akademisi menggunakan istilah teknis.
3. Partisipasi terbatas: keterlibatan masyarakat lebih bersifat formalitas daripada substantif.
4. Minim komitmen eksternal: pemerintah kabupaten dan investor belum menunjukkan konsistensi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tantangan ini konsisten dengan literatur tentang *collaborative governance* yang menekankan perlunya kesetaraan, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas dalam kolaborasi lintas aktor. (Emerson & Nabatchi, 2015)

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD) di Sembalun berhasil mengidentifikasi isu-isu sentral pariwisata yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Permasalahan utama meliputi degradasi lingkungan dan lemahnya implementasi tata ruang, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, erosi nilai budaya lokal, kerentanan gender dalam pengelolaan pariwisata, serta keterbatasan regulasi dan kapasitas tata kelola. Temuan ini memperkuat asumsi awal bahwa pengembangan

pariwisata di Sembalun bersifat multidimensi dan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas aktor. DMO Sembalun muncul sebagai fasilitator penting yang berupaya menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan pemerintah kabupaten. Namun, efektivitas perannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan konsistensi dukungan dari aktor eksternal, khususnya pemerintah kabupaten dan investor swasta. Meskipun demikian, forum FGD menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan kemauan bersama untuk memperkuat tata kelola pariwisata berbasis kolaborasi. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat, membangun kepercayaan antar aktor, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan untuk mendukung SDGs.

Pengembangan pariwisata di Sembalun memerlukan langkah strategis yang terintegrasi. Pemerintah desa perlu diperkuat kewenangannya agar dapat berperan aktif dalam pengawasan tata ruang dan lingkungan, sementara DMO Sembalun harus difasilitasi sebagai pusat koordinasi antaraktor dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai. Revitalisasi budaya lokal seperti gotong royong dan tradisi adat penting dilakukan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dilestarikan, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial dalam pengelolaan destinasi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui model Community-Based Tourism (CBT) perlu dikembangkan untuk memastikan manfaat pariwisata lebih adil dan langsung dirasakan warga desa. Perempuan dan generasi muda harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, baik melalui pelatihan kewirausahaan maupun pengelolaan usaha wisata berbasis keluarga. Di sisi lain, konsep global seperti SDGs sebaiknya disosialisasikan dengan bahasa dan simbol lokal agar lebih mudah dipahami masyarakat. Pada akhirnya, seluruh rekomendasi hasil FGD ini harus ditindaklanjuti melalui advokasi kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi, sehingga isu-isu yang muncul tidak berhenti pada wacana lokal, tetapi terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih luas, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Universitas Mataram yang sudah mendanai pelaksanaan pengabdian, Direktur Destination Management Organization Sembalun serta Kepala Desa Sembalun yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt19dzcvf>
- Hawkins, D., Nisrina Pawitrantri Rahma Budi, D., Bilqis Shafira, A., & Abbas, R. J. (2021). Sustainable tourism and environmental degradation in the Rinjani-Lombok Unesco Global Geopark. *New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences*, 14(14), 38–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.18844/gjpaas.v14i1.6794>
- Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958>
- Transkrip Focus Group Discussion (FGD) terkait Sosialisasi Program Kerja DMO Sembalun dan Strategi Kolaboratif dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kawasan Sembalun. (2025).
- Ulfa, H. (2023). Policy Analysis of Sustainable Tourism Destination Management Organization (DMO) in 10 Countries with the Best Tourism Version of the Travel & Tourism Development Index. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(4), 2441–2449. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i4.33949>
- Vitriani, C. D., Sudibyo, D., & Hermantoro, H. (2017). Socio-Economic Impacts of Tourism Development in Rural Area of Sembalun East Lombok West Nusa Tenggara. *TRJ Tourism Research Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30647/trj.v1i1.2>

Voets, J., Brandsen, T., Koliba, C., & Verschuere, B. (2021). Collaborative Governance. Oxford Research Encyclopedias, Politics, June, 1–21.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419>